

EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN AGROFORESTRI DI KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG

Nela Najwa Hilalia, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study is based on the phenomenon of inadequate management of vacant land in Bringin District, Semarang Regency. The objective of this research is to assess the effectiveness of the forest and agroforestry land rehabilitation program in Bringin District, Semarang Regency, and to analyze the supporting and inhibiting factors affecting its effectiveness. The study employs the policy dimensions of effectiveness theory and utilizes a descriptive quantitative analysis for data processing. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires using purposive sampling techniques to 73 respondents. The research results are evaluated using six indicators: policy accuracy, target accuracy, process accuracy, communication, policy content, and resources. Based on two indicators, namely policy accuracy and process accuracy, the program has not yet been fully effective. In terms of policy accuracy, the issue lies in the fact that local communities lack a stable market for selling their harvests. Meanwhile, the process accuracy indicator reveals that the road access for farmers and laborers remains difficult, and the available shelters are inadequate. These findings indicate that the implementation of the forest and agroforestry land rehabilitation program in Bringin District, Semarang Regency, has yet to be effective. The researcher recommends that the Watershed and Protected Forest Management Agency (BPDASHL) consider partnering with private entities, particularly those involved in the agricultural and forestry sectors. Additionally, it is suggested to improve road access and the shelters in the planting areas to facilitate mobility and the storage of harvests and farming tools. BPDASHL could also collaborate with KTH Mandiri Jaya I to build larger shelters that meet the needs of both farmers and laborers.

Keywords: Program Effectiveness, Land Management, Community

PENDAHULUAN

Kesadaran terkait pentingnya mengelola hutan dan lahan untuk mempertahankan fungsi dan kegunaannya masih menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Hutan dan lahan yang sejatinya membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sering kali dikelola dengan tidak tepat. Kurangnya wawasan dan tidak adanya dana yang turut menjadi kendala, sehingga

menyebabkan masyarakat enggan untuk turun tangan pada pelaksanaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Hutan menjelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan mempunyai tujuan untuk memulihkan, meningkatkan maupun mempertahankan fungsi hutan dan lahan agar dapat meningkatkan daya dukung, produktivitas maupun perannya dalam menjaga sistem kehidupan manusia. Pengelolaan hutan dan lahan sendiri dapat dilakukan dengan menanam beberapa jenis tumbuhan seperti menanamkan tanaman berkayu, buah-buahan, ataupun semusim guna membentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara komponen penyusunnya.

Manfaat yang diberikan dari pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri yaitu menghasilkan oksigen yang berlimpah, mencegah terjadinya bencana alam, memperbaiki kualitas hidup masyarakat di sekitar. Dampak yang

dirasakan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sekitar. Namun, pelaksanaan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri yang dilakukan tidak hanya bisa berasal dari pemerintah saja, hal tersebut membutuhkan adanya partisipasi masyarakat yang dapat membantu pemerintah guna menjadikan program yang dijalankan efektif.

Pemerintah perlu meninjau lahan-lahan kosong ke setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga mampu mengetahui potensi apa yang dapat diperoleh dari lahan-lahan yang masih belum dikelola secara maksimal. Pemerintah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Semarang sendiri telah melakukan peninjauan dan pencatatan terhadap luas hutan dan lahan yang tersebar di seluruh penjuru daerah. Setiap hutan maupun lahan memiliki potensinya yang turut diikuti dengan kekurangannya.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

terdapat data lahan hutan dari setiap kecamatan di Kabupaten Semarang, data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Luas Lahan Hutan Per-Kecamatan Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Getasan	6,570,00	6,580,00	6,580,00
2.	Tengaran	4,719,59	4,729,59	4,729,59
3.	Susukan	4,883,97	4,884,97	4,884,97
4.	Kaliwungu	3,994,61	3,995,61	3,995,61
5.	Suruh	6,400,85	6,401,85	6,401,85
6.	Pabelan	4,796,61	4,798,61	4,798,61
7.	Tuntang	5,613,20	5,622,20	5,622,20
8.	Banyubiru	5,440,07	5,441,07	5,441,07
9.	Jambu	5,161,04	5,163,04	5,163,04
10.	Sumowono	5,561,03	5,563,03	5,563,03
11.	Ambarawa	3,820,95	3,821,95	3,821,95
12.	Bandungan	4,821,20	4,822,20	4,822,20
13.	Bawen	4,657,34	4,659,34	4,659,34
14.	Bringin	3,593,86	3,593,86	3,593,86
15.	Bancak	4,383,60	4,384,60	4,384,60
16.	Pringapus	7,834,25	7,835,25	7,835,25
17.	Bergas	4,731,22	4,733,22	4,733,22
18.	Ungaran Barat	6,188,75	6,188,75	6,188,75
19.	Ungaran Timur	3,797,06	3,799,06	3,799,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)

Berdasarkan tabel luas hutan yang ada di setiap kecamatan dari Kabupaten Semarang, ada satu kecamatan yang masih memiliki luas hutan yang minim yaitu Kecamatan Bringin. Jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain, Kecamatan Bringin hanya memiliki luas 3.593,86. Rendahnya lahan hijau di suatu

daerah dapat memicu dampak baru baik untuk lingkungan ataupun masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Adapun data luas lahan kosong di Kabupaten Semarang yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Luas Lahan Kosong di Kabupaten Semarang

Tahun	Luas	Persentase
2019	9.468	10.03%
2020	9.643	9.8%
2021	10.151	9.3%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022)

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, Menunjukkan bahwa lahan terbuka hijau di Provinsi Jawa Tengah seluas 21.735 ha, sementara luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri seluas 32.801 ha. Luas wilayah dari Kabupaten Semarang sendiri mencapai 95.02 Ha dan sementara di Kecamatan Bringin luasnya mencapai 6.189

Ha, sementara pada luas lahan untuk hutan tanaman hanya mencapai 3.5 Ha.

Merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 2 tentang Penataan Ruang, lahan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu wilayah seharusnya mencapai 30% dari total luas wilayah daerah yang mana terbagi menjadi RTH publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Fakta yang terdapat di lapangan, ditemukan jika Kecamatan Bringin terindikasi jauh dari kata ideal untuk mampu memenuhi kriteria yang tertuang dalam regulasi. Pemenuhan lahan dengan menanamkan pohon yang sesuai dengan potensinya dapat dituangkan dalam berbagai lingkup kawasan seperti di berbagai desa di dalam satu kecamatan.

Pembukaan lahan dan pembangunan di suatu daerah patut diimbangi dengan penanaman pohon guna dapat meminimalisir kerusakan yang dapat terjadi. Pelaksanaan

pembukaan lahan yang mana mempunyai tujuan tersendiri baik kepentingan bersama ataupun pribadi menyebabkan masyarakat juga perlu memikirkan bagaimana cara memulihkan fungsi dan kegunaan semestinya suatu lahan yang telah ataupun tidak digunakan. Penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memulihkan keadaan lingkungan yang mana dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah.

Pemerintah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Pemali Jratun Kota Semarang membentuk program yakni program tersebut memerlukan partisipasi masyarakat di dalamnya. Tingkat partisipasi yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan program yang diselenggarakan sebab dapat memengaruhi bagaimana keberlangsungannya. Tidak hanya itu, dari partisipasi adapun beberapa bentuk jenis partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bringin pada saat

melakukan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Bentuk partisipasi yang dilakukan mempunyai peranan yang penting karena dapat memengaruhi kerja sama yang dilakukan dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Pemali Jratun Kota Semarang dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung atau BPDASHL Pemali Jratun Kota Semarang sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah BPDASHL bertugas untuk melaksanakan pembentukan rencana, implementasi rehabilitasi dan lahan serta melakukan konversasi terhadap tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, serta melaksanakan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

Merujuk pada tugas organisasi publik terkait, upaya rehabilitasi hutan dan lahan berguna untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga produktivitas dan daya dukung terhadap lahan sebagai sistem penyangga kehidupan dapat terjaga. Program dari BPDASHL Pemali Jartun turut bertujuan untuk menahan degradasi lahan maupun sedimentasi yang dapat mencapai 250 ton/km²/tahun (BPDASHL, 2022).

Berdasarkan perencanaan dan program yang dimiliki oleh BPDASHL, terdapat program kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Kegiatan penanaman rehabilitasi hutan dan lingkungan agroforestri merupakan program yang dimiliki oleh BPDASHL yaitu memberikan bibit pohon secara gratis kepada masyarakat dengan syarat utama adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkannya. BPDASHL tidak hanya memberikan bibit saja, pihaknya juga

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara berkelompok dalam menanam pohon sebagai bentuk upaya rehabilitasi hutan serta dari sisi BPDASHL dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap bibit yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pemantauan yang dilakukan oleh BPDASHL tidak semata-mata agar bibit tersebut tidak dijual kembali oleh masyarakat, sebab pemerintah turut ingin membangun rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan sekitar dengan mengingat bagaimana lahan yang efektif mempunyai daya tarik salah satunya jika meninjau dari aspek ekonomi yang berpotensi untuk menyejahterakan masyarakat sekitar dengan memanfaatkannya. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungan dari kelestarian lingkungan dengan terus mengelolanya secara berkelanjutan yakni salah satunya dengan melakukan rehabilitasi pada lahan.

Akibat yang dapat ditimbulkan dari kurangnya ruang terbuka hijau juga akan menyebabkan berbagai dampak yang tidak diharapkan seperti terjadinya banjir, tanah longsor, kurangnya kualitas mata air di sekitar pemukiman, tanah tidak subur dan lain-lain. Rasa acuh atas lingkungan sekitar perlu ditindaklanjuti bersama, tidak hanya dari program pemerintah saja tetapi masyarakat yang turut andil berpartisipasi dan bersinergi bersama pemerintah dalam menghijaukan kembali lahan-lahan yang seharusnya digunakan dengan baik.

Program rehabilitasi hutan dan lahan yang mengunggulkan teknik agroforestri karena teknik ini dikenal sebagai solusi atas persoalan lingkungan seperti degradasi lahan yang menurunkan kualitas lahan, penggundulan hutan, pasokan cadangan air dan gas rumah kaca dalam jangka panjang serta masalah sosial seperti perekonomian masyarakat dalam lingkup agribisnis (Patel dan Moore, 2017). Menurut Dagar dan

Tewari (2017:23) jika agroforestri memiliki karakteristik perpaduan dari agrikultur dan kehutanan. Hal ini diartikan bahwa agroforestri merupakan revolusi di bidang perkebunan melalui interaksi antara berbagai jenis tumbuhan dan sebagai bentuk upaya revolusi penggunaan lahan yang memanfaatkan jenis tumbuhan yang berbeda pada satu lahan.

Penggunaan teknik agroforestri sebagai salah satu upaya peningkatan daya fungsi lahan melalui penanaman tumbuhan dengan jenis yang berbeda dari satu dan lainnya. Teknik agroforestri juga menawarkan perbaikan atas fungsi lahan dengan manfaat seperti meningkatkan tangkapan air hujan dan penyerapan karbon serta mengurangi potensi banjir, dan meningkatkan kesuburan lahan. Pada dasarnya, agroforestri memberi banyak keuntungan terutama pada keanekaragaman hayati karena menjadi wadah baru dalam

pengelolaan ekosistem dan membantu pembangunan serta konservasi.

Urgensi pemerintah dalam melakukan rehabilitasi lahan dengan teknik agroforestri harus selaras dengan keterbukaan informasi program yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini karena minimnya akses informasi dan keterbukaan terhadap program dapat menghambat masyarakat dalam mengetahui dan penerimaan informasi secara jelas dalam menjawab persoalan yang dimiliki. Penanaman pohon di lahan-lahan kosong tidak hanya memberikan manfaat kepada lingkungan, tetapi turut memberdayakan masyarakat di sekitar apabila masyarakat berhasil memanfaatkan bibit-bibit gratis yang diberikan oleh pemerintah, sehingga nilai ekonomi yang dimiliki dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan pun dapat berlangsung secara terus menerus sebab dapat dijadikan sebagai salah

satu sumber penghasilan yang meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

KERANGKA TEORI

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bentuk proses pelaksanaan yang dilakukan setelah sebuah kebijakan ditetapkan. Tahapan implementasi digunakan sebagai tolok ukur dari berhasil atau tidak suatu program. Menurut Edward III (Kadji, 2015) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu tahapan yang mampu memengaruhi berbagai aspek, sehingga masih terdapat kemungkinan kebijakan mengalami kegagalan meskipun pengambilan kebijakan dinilai telah tepat.

Efektivitas Program

Efektivitas pelaksanaan kebijakan dijelaskan sebagai pengukuran terhadap tercapai atau tidaknya kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut Riant Nugrho (2012:707-710) mengemukakan

bahwa terdapat lima tepat sebagai tolok ukur keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

- a) Tepat Kebijakan
- b) Tepat Pelaksanaan
- c) Tepat Target
- d) Tepat Lingkungan
- e) Tepat Proses

Pada umumnya, implementasi kebijakan terdiri dari tiga proses, yaitu penerimaan kebijakan, adaptasi kebijakan, dan kesiapan strategi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengambilan data menggunakan penyebaran kuesioner, observasi, dokumentasi yang dapat menggambarkan fenomena program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* kepada 73 orang yang merupakan anggota Kelompok Tani Hutan Mandiri Jaya I. Lokus penelitian dilakukan di Desa Nyemoh, Kecamatan

Bringin, Kabupaten Semarang dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun Kota Semarang.

HASIL & PEMBAHASAN

1) Tepat Kebijakan

Tabel 3.42 Kategorisasi Indikator Tepat Kebijakan

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	Skor Total	Kategori
1.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju telah mengetahui tujuan penyelenggaraan program dan tujuan dari rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun?	73	274	Sangat Baik
2.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun menyelenggarakan program tersebut?	73	273	Sangat Baik
3.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju terbantu dengan adanya program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun?	73	241	Baik
Skor Total			788	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan indikator Tepat Kebijakan mempunyai skor total 788 yang berada di kategori baik. Pada P1 dengan skor total 274 untuk kategori sangat baik. Responden berpendapat bahwa telah mengetahui tujuan diselenggarakannya program dan tujuan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Pengadaan rehabilitasi pada lahan milik masyarakat Desa Nyemoh memberikan dampak yang baik karena manfaat yang

didapatkan. Pada P2 diperoleh skor total 273 responden dengan kategori sangat baik. Hal ini diartikan bahwa Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun dapat mengadakan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Desa Nyemoh. Pemilihan lokasi rehabilitasi telah diukur dari kebutuhan lahan yang perlu diperbaiki pengelolaannya. Pemilihan Desa Nyemoh sebagai lokasi penyelenggaraan dinilai juga memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk senantiasa merawat dan mengelolanya dengan baik.

Sementara pada P3 mendapatkan skor total 241 responden dengan kategori baik yakni masyarakat yang berpartisipasi merasa terbantu dengan hadirnya program. Keikutsertaan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi dapat

membantu masyarakat Desa Nyemoh dalam bidang ekonomi.

2) Tepat Target

Tabel 3.45 Kategorisasi Indikator Tepat Target

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	Skor Total	Kategori
1.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dengan penyelenggaraan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri di Desa Nyemoh?	73	238	Baik
2.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju mendapatkan manfaat ekonomi dari pelaksanaan program?	73	261	Baik
3.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju hasil panen yang diperoleh memiliki nilai jual?	73	273	Sangat Baik
4.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju terdapat manfaat untuk lingkungan sekitar pasca pelaksanaan program?	73	267	Sangat Baik
Skor Total			1039	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan indikator Tepat Target mendapatkan skor total sejumlah 1039 dengan kategori sangat baik. Pada P3 mengulas mengenai hasil panen yang diperoleh memiliki nilai jual. Hal yang dimaksudkan yakni bahwa masyarakat tidak hanya mengelola dan memulihkan fungsi lahan, tetapi juga mendapatkan manfaat dari kegiatan rehabilitasi tersebut. Para petani yang menjadi anggota kelompok dapat menjual hasil panen.

Pada P4 sejumlah 267 skor total dimana dalam pertanyaan ini

mengulas manfaat yang diperoleh untuk lingkungan sekitar pasca pelaksanaan program. Manfaat untuk lingkungan yang dimaksudkan adalah perubahan kualitas air, tanah, maupun udara setelah dilakukannya rehabilitasi pada lahan masyarakat Desa Nyemoh.

Sementara, pada item pertanyaan P2 memperoleh skor total sejumlah 261, yang mana pertanyaan ini berkaitan dengan item pertanyaan P3 dimana masyarakat yang bergabung ke dalam program mampu untuk memperoleh manfaat di bidang ekonomi. Hal ini karena setiap petani mendapatkan upah harian sebagai sumber pendapatan utama dan diperbolehkan oleh pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun untuk menjual hasil panen.

Pada P1 sejumlah 238 untuk kategori baik. Poin ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Nyemoh setuju jika program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dilakukan di desa tersebut. Meskipun perolehan skor total cukup rendah, tetapi masyarakat Desa Nyemoh tetap antusias mengikuti program yang diselenggarakan.

3) Tepat Proses

Tabel 3.48 Kategorisasi Indikator Tepat Proses

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	Skor Total	Kategori
1.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dengan peraturan program yang telah dibuat oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun?	73	274	Baik
2.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju atas terbentuknya kelompok tani untuk melaksanakan program?	73	241	Baik
3.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju menerima tanggung jawab untuk melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri?	73	277	Sangat Baik
Skor Total			792	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan indikator Tepat Proses memperoleh skor total sejumlah 792 dengan kategori baik. Pada P3 menjelaskan tentang kesiapan para petani untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Antusiasme yang

dimiliki oleh masyarakat Desa Nyemoh membuat masyarakat siap untuk bertanggung jawab dengan segala aturan dan tugas yang akan dijalankan dalam program.

Kemudian pada P1 dengan perolehan skor total sejumlah 274 yang mengulas tentang peraturan program yang dibuat oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun. Peraturan yang dibuat berisikan tata aturan seperti lingkup kerajaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, biaya dan cara pembayaran, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serah terima hasil pekerjaan, perselisihan, serta keadaan kahar.

Sementara pada P2 dengan memperoleh 241 skor total. Pertanyaan ini menjelaskan terkait persetujuan masyarakat Desa Nyemoh yang dijadikan dalam satu

kelompok tani hutan. Tujuan dibentuknya kelompok tani hutan ini oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun agar mempermudah kegiatan rehabilitasi lahan dan penyampaian terkait hal yang berhubungan dapat terorganisir dengan baik.

4) Komunikasi

Tabel 3.51 Kategorisasi Indikator Komunikasi

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	Skor Total	Kategori
1.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun telah memberikan penjelasan terkait tujuan program?	73	272	Sangat Baik
2.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju telah memahami tujuan program melalui sosialisasi yang diberikan?	73	269	Sangat Baik
3.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju jika Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun konsisten mengomunikasikan persoalan?	73	263	Sangat Baik
Skor Total			804	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan indikator Komunikasi diperoleh skor total sejumlah 804 dengan kategori baik. Pada P1 menjelaskan terkait Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun memberikan penjelasan terkait tujuan program kepada masyarakat Desa Nyemoh. Sebelum diselenggarakan sebuah program, pemerintah perlu memberikan penjelasan arti dan tujuan

program kepada masyarakat. Penjelasan yang diberikan bertujuan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas dan ikut serta memberikan dukungan kepada program, sehingga pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya adalah P2 dengan perolehan skor total sejumlah 269 dari responden yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Nyemoh tentang tujuan program melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun. Pengadaan sosialisasi juga dapat menunjukkan antusiasme pihak yang menjadi sasaran, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan.

Pada P3 mengulas tentang Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun konsisten dalam mengomunikasikan persoalan bersama

dengan para petani. Persepsi dari responden setuju jika pihak pemerintah senantiasa konsisten memberikan masukan jika terjadi permasalahan dan memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung ke lapangan ketika diperlukan.

5) Isi Kebijakan

Tabel 3.54 Kategorisasi Indikator Isi Kebijakan

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	Skor Total	Kategori
1.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun menjadi agen pelaksana program dari pemerintah?	73	274	Sangat Baik
2.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dapat menjaga lahan dengan baik setelah diselenggarakannya program?	73	273	Sangat Baik
3.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dapat merasakan manfaat ekonomi pasca pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri?	73	263	Sangat Baik
Skor Total			810	Baik

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Berdasarkan indikator Isi Kebijakan memperoleh skor total sejumlah 810 dari responden. Item pertanyaan yang mendapatkan skor tertinggi adalah P1 dengan skor total sejumlah 274 dari responden. Pada P1 mengulas terkait Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun sebagai agen pelaksana program dari pemerintah. Tingginya tanggapan dari responden menunjukkan bahwa kelompok tani hutan Mandiri Jaya I

setuju jika Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun menjadi agen pelaksana program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dari pemerintah.

Hal ini karena balai terkait merupakan unit pelaksana yang bertanggung jawab langsung pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Urusan terkait perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan menjadi tugas dari balai tersebut.

Pada P2 memperoleh skor total sejumlah 273 dari responden yang mengulas ketersediaan anggota kelompok tani hutan Mandiri Jaya I menjaga lahan dengan baik pasca pelaksanaan program. Para petani setuju untuk senantiasa menjaga lahan yang telah ditanami meskipun program telah berakhir. Hal yang dilakukan membentuk sistem yang berkelanjutan, sehingga pemerintah dapat melepaskan masyarakat untuk mengelola dan merawat lahan tanpa campur tangan dari pihak luar.

Pada item P3 dengan skor total 263 dari responden. Para petani setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini karena setelah bibit yang tertanam menghasilkan buah ataupun kayu, para petani dapat menjualnya kepada orang lain tanpa harus mengurus perizinan kepada pihak pemerintah. Hasil panen yang dijual juga menjadi tambahan bagi sumber pendapatan petani selain upah yang didapat selama mengurus lahan.

6) Sumber Daya

Tabel 3.57 Kategorisasi Indikator Sumber Daya

No.	Pertanyaan	Jumlah Responden	Skor Total	Kategori
1.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dengan pemberian bibit gratis dari pemerintah?	73	273	Sangat Baik
2.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dengan jenis bibit yang diberikan?	73	241	Baik
3.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju jenis bibit yang ditanam mempunyai nilai ekonomi?	73	274	Sangat Baik
4.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju dengan untuk diikutsertakan ke dalam program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri?	73	269	Sangat Baik
5.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara setuju pelaksanaan program menggunakan lahan pribadi?	73	270	Sangat Baik
Skor Total			1327	Sangat Baik

Sumber: Data primer diolah, 2024.

Pada indikator Sumber Daya diperoleh skor total sejumlah 1327 dengan kategori sangat baik. Dalam P3 menunjukkan bahwa responden setuju terhadap jenis bibit yang ditanam mempunyai nilai ekonomi.

Jenis bibit yang diberikan untuk melaksanakan rehabilitasi yaitu alpukat, mangga, petai, kayu balsa, dan indigofera. Perpaduan tumbuhan buah, pohon kayu, dan tanaman pangan ternak merupakan bentuk teknik agroforestri. Agroforestri sendiri bertujuan untuk mendiversifikasi sistem penanaman, mitigasi risiko dengan mempertahankan fungsi hutan dalam mendukung daerah aliran sungai dan mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

Pada P1 dengan perolehan skor total sejumlah 273 dari responden yang menunjukkan bahwa para anggota setuju dengan pemberian bibit gratis untuk pelaksanaan rehabilitasi pada lahan milik masyarakat Desa Nyemoh. Salah satu faktor kendala masyarakat untuk mengelola lahannya adalah

terkendala oleh dana untuk membeli bibit dan bahan-bahan perawatan. Pengadaan program membantu mengurangi kendala tersebut sebab bibit telah disediakan secara gratis oleh pemerintah.

Sasaran lokasi pelaksanaan rehabilitasi pada program diulas melalui item pertanyaan P5 dengan skor total sejumlah 270 dimana kelompok tani hutan Mandiri Jaya I setuju untuk menggunakan lahan pribadi. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya dapat dilakukan pada lahan milik negara, tetapi dapat diterapkan pada lahan milik masyarakat. Penggunaan lahan pribadi untuk rehabilitasi lahan selain berfungsi untuk menjaga ekosistem lingkungan sekitar yaitu masyarakat dapat memanfaatkan sebesar-besarnya hasil tanamannya.

Pada P4 yang mendapatkan skor total 269 dari responden. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setuju untuk diikuti sertakan ke dalam pelaksanaan program sebab sebuah program pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat. Adanya peran masyarakat di dalam suatu program merupakan suatu dukungan dan membantu menyukseskan program untuk mencapai tujuannya.

Sementara untuk item pertanyaan P2 merupakan yang terendah dengan perolehan skor total 241. Pada item pertanyaan P4 menunjukkan pendapat petani terkait dengan jenis bibit yang diberikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun. Dalam konteks ini para petani berpendapat jika jenis bibit yang diberikan dapat lebih bervariasi dari yang ditanam. Mengingat luas lahan

yang menjadi sasaran rehabilitasi tidaklah sedikit, sehingga diharapkan pemerintah memberikan variasi lain untuk jenis bibit kepada masyarakat Desa Nyemoh.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini belum efektif. Hal ini merujuk dari faktor-faktor yang memengaruhi sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Faktor penghambat datang dari tepat kebijakan pada item pertanyaan P3 yang menjelaskan bagaimana masyarakat masih belum merasa terbantu secara signifikan dengan hadirnya program rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri. Kebijakan yang dibuat menunjukkan bahwa hasil panen dapat dikomersialkan oleh para petani dan buruh tani, akan tetapi tidak ada kejelasan wadah untuk pemasarannya. Akses pasar

yang masih belum jelas menjadikan buruh tani dan petani terkendala dalam memasarkan hasil panennya. Ketidakjelasan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan yang diterima. Pendapatan yang diterima oleh buruh tani dan petani yang sejatinya berasal dari dua sumber yakni upah harian dan hasil penjualan justru hanya bergantung dengan upah harian.

2. Tepat Proses

Faktor penghambat tepat proses ditemukan pada item pertanyaan P2 merujuk pada tanggapan responden bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan agroforestri dapat dilakukan di desa lain yang memiliki akses lebih menunjang. Hal ini karena akses jalan yang masih sulit dijangkau oleh buruh tani dan petani dengan medan yang kurang memadai, sehingga mempersulit mobilitas

petani untuk mencapai lokasi lahan. Hambatan lain yang dialami adalah terkait gubuk atau tempat penyimpanan hasil panen, alat-alat bertani, dan bahan perawatan tanaman yang masih belum maksimal. Ukuran gubuk yang dibuat oleh BPDASHL tidak disesuaikan dengan kebutuhan yang digunakan oleh para buruh tani dan petani. Hal ini menjadikan buruh tani dan petani harus membawa pulang bahan perawatan maupun hasil panennya akibat ukuran yang tidak memadai.

Saran

1. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun dapat mempertimbangkan untuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta, terutama pihak yang bekerja di bidang pertanian

kehutanan guna memberikan akses pasar yang lebih luas bagi petani dan memberikan tambahan modal.

2. Program yang dilakukan dapat mencoba diversifikasi jenis tanaman lain yang disesuaikan dengan iklim dan tanah di Desa Nyemoh, sehingga dapat meningkatkan variasi hasil panen yang diperoleh.
3. Demi mendukung keberlangsungan program, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun dapat mengoptimalkan kembali akses jalan dan gubuk di area sekitar penanaman untuk mempermudah para petani menyimpan hasil panen dan peralatan serta bahan-bahan perawatan.
4. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun dapat membuat gubuk penyimpanan dengan ukuran yang

menyesuaikan kebutuhan buruh tani dan petani selama mengelola lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwiyanto, A. (2022). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. Ugm Press.

Keban, Y. T. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara.

Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.

Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.

Internet

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito. (2022, April 24). Retrieved Maret 20, 2023, from BPDASBARITO: <https://bpdasbarito.or.id/balai-pengelolaan-daerah-aliran-sungai-dan-hutan-lindung-barito/>

Ruang Terbuka Hijau. (2022). Retrieved Maret 20, 2023, from SIPSN: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/rth>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. (2007, April 26). Retrieved Maret 20, 2023, from JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>

Jurnal

- Azzam, R. F., & Susanti, R. (2022). Tingkat Pelayanan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat di Perumnas Pucang Gading Demak. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 11(3), 249-261.
- Chu, Z., Bian, C., & Yang, J. (2022). How can public participation improve environmental governance in China? A policy simulation approach with multi-player evolutionary game. *Environmental Impact Assessment Review*, 95, 106782.
- Hao, C., Nyaranga, M. S., & Hongo, D. O. (2022). Enhancing public participation in governance for sustainable development: Evidence from Bungoma County, Kenya. *SAGE Open*, 12(1), 21582440221088855.
- Herawati, E., Roslinda, E., & Astiani, D. EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RESORT TERHADAP PEREKONOMIAN DESA (Studi Kasus di RPH Hulu Kapuas UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur). *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*, 1(3), 856-885.
- Idris, A. I., Arafat, A., & Fatmawati, D. (2019). Pola dan Motivasi Agroforestry Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Petani Hutan Rakyat Di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 92-113.
- Mohi, E. H., Nento, F., & Tueno, N. S. (2019). Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program reboisasi di Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 6(2), 106-114.
- Muhammad, F., Maryono, M., Hadiyanto, H., Retnaningsih, T., & Hastuti, R. B. (2023). Reboisasi Sebagai Upaya Konservasi di KHDTK Dipoforest Hutan Penggaron Kabupaten Semarang. *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 5(1).
- Murniati, Suharti, S., Minarningsih, Nuroniah, H. S., Rahayu, S., & Dewi, S. (2022). What makes agroforestry a potential restoration measure in a degraded conservation forest. *Forests*, 13(2),
- Ombogoh, D. B., Mwangi, E., & Larson, A. M. (2022). Community participation in forest and water management planning in Kenya: challenges and opportunities. *Forests, Trees and Livelihoods*, 31(2), 104-122.
- Ollinaho, O. I., & Kröger, M. (2021). Agroforestry transitions: The good, the bad and the ugly. *Journal of Rural Studies*, 82, 210-221.
- Palmolina, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Demplot Agroforestri Jambalng (*Syzygium cumini* Linn). *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 2(2)
- Pharcharuen, W., Suramati, P. W., Phrakhrusutaworathammakit, P., Mahawaro, P., & Chantawaree, S. (2021). Community participation in sustainable management of community forests: Case study Ban Mae Hong Khrai, Mae Pong Sub-District, Doi Saket District, Chiang Mai Province. *Linguistics and Culture Review*, 5(S2), 1373-1388.

- Prayogo, P., Fauzi, H., & Naemah, D. (2020). ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN POLA AGROFORESTRI PADA HUTAN KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DESA TEBING SIRING, KABUPATEN TANAH LAUT). *Jurnal Sylva Scientae*, 3(4), 709-719.
- Purwanti, N., Rahim, S., & Hamidun, M. S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Belantara*, 5(1), 72-80.
- Puspitasari, N. Z., Kumala, N. D., Putra, Y. R. K., & Alamiyah, S. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 5(1), 85-92.
- Quandt, A., Neufeldt, H., & Gorman, K. (2023). Climate change adaptation through agroforestry: Opportunities and gaps. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 60, 101244.
- Qurniati, R., & Kaskoyo, H. (2019). Kontribusi Tanaman Agroforestri terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Petani (Contribution of Agroforestry Plants to Farmers' Income and Welfare). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 118-127.
- Rahmawati, I., Hayati, F. N., Pratiwi, A. H., Wahyuni, N. P., Septiani, S. A., Hutami, A., & Haila, H. (2022). Partisipasi Masyarakat Desa Waringin Kurung Terhadap Perkembangan Program Agroforestri. *Eastasouth journal of Effective Community Services*, 1(02), 28-35.
- Roziaty, E., & Pristiwi, Y. (2020). Keanekaragaman spesies dalam sistem agroforestri di desa surajaya kecamatan pemalang kabupaten pemalang jawa tengah. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 6(2), 76-88.
- Saleh, M. I., & Ariandi, R. (2023). Model Agroforestry yang Diterapkan Kelompok Tani Hutan (KTH) Berbasis Agribisnis di Desa Ulusaddang Kabupaten Pinrang. *JURNAL GALUNG TROPIKA*, 12(2), 191-202.
- Sami, R. G. (2020). IMPLIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SWADAYA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 121-138.